

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum. Dari ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah harus melaksanakan pelayanan masyarakat yang baik. Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga menjadi instansi yang berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi; dan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategi sedangkan Tujuan dari laporan kinerja ini adalah agar visi, misi dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis.

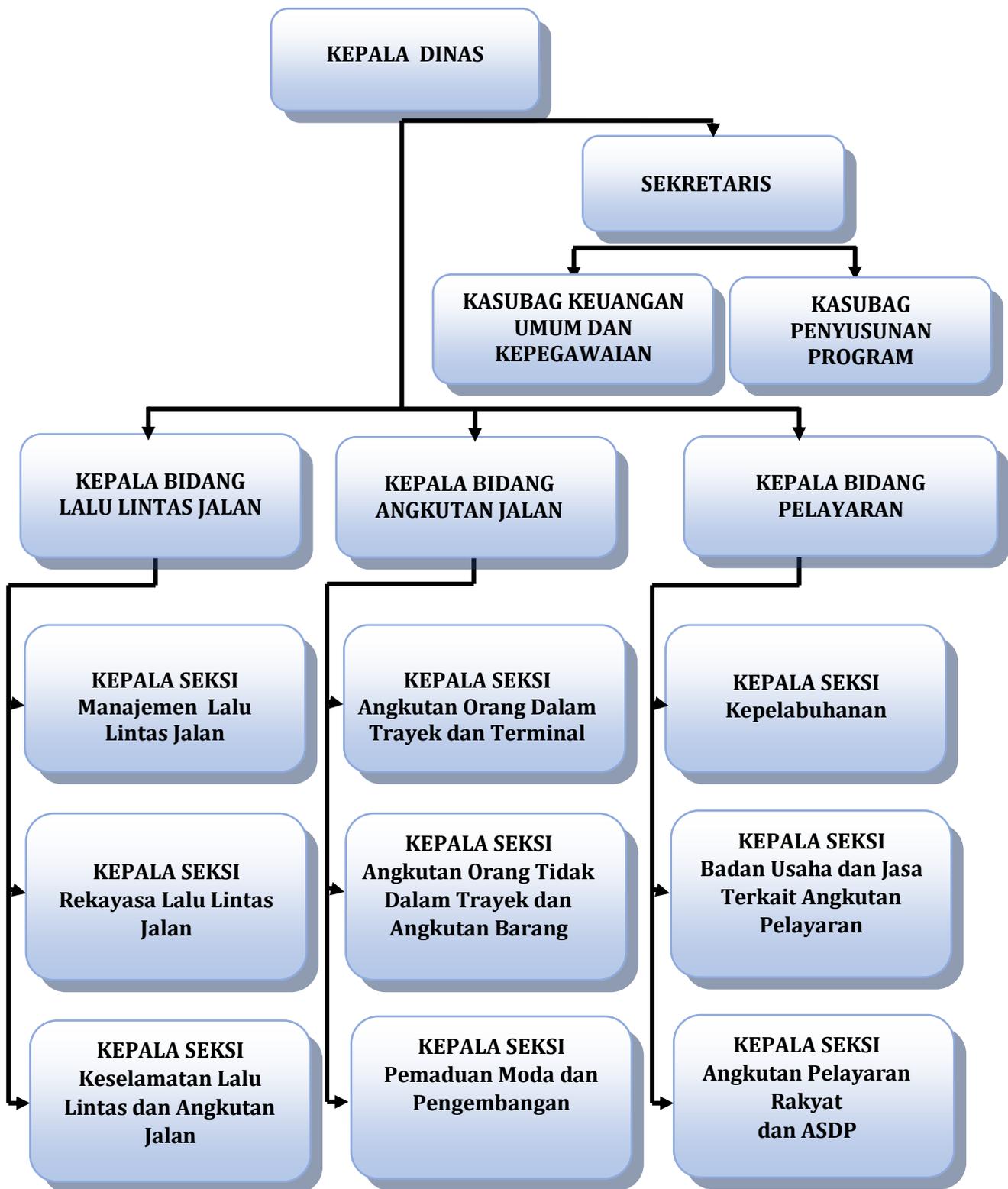
Laporan kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi :

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - c. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
- 4) Bidang Pelayaran, terdiri atas :
 - a. Seksi Kepelabuhan;
 - b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah



1.6 Permasalahan Utama

Transportasi saat ini semakin sangat penting peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Semakin mudah akses sarana dan meningkatnya pelayanan transportasi maka semakin baik pula tingkat mobilitas masyarakatnya.

Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan transportasi secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
2. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
3. Kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan di Provinsi Kalimantan Tengah seperti marka, rambu, RPPJ, Delineator, Guadrail, Paku Jalan dan lainnya, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian, pengrusakan dan adanya perbaikan jalan sehingga rambu tidak dipasang kembali.
4. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut.
5. Besarnya tingkat pengguna kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
6. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi priority bagi pemangku kebijakan.
7. Belum tertatanya manajemen pengusaha angkutan travel, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pribadi/ orang yang mengelola usaha angkutan travel secara pribadi, tanpa ada izin.
8. Belum tersedianya *Data Base* sungai – sungai yang menggambar secara menyeluruh berkaitan dengan alur, sarana prasarana dan fasilitas keselamatan yang akan dibangun.

9. Belum lengkapnya rambu-rambu sungai dan fasilitas dermaga, hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang dimiliki.
10. Berkurangnya jumlah penumpang angkutan SDP, hal ini disebabkan karena pengalihan moda ke transportasi jalan.
11. Bandara di Kalimantan Tengah yang belum mampu melayani rute penerbangan dengan jenis pesawat berkapasitas besar.
12. Belum adanya pemadu moda dari moda Transportasi Udara ke Transportasi Jalan dan moda lainnya.
13. Fasilitas penunjang untuk penyampaian informasi kepada masyarakat yang masih terbatas.
14. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.
15. Kurangnya sumber daya manusia teknis yang memadai, hal ini disebabkan karena anggaran yang kurang memadai untuk mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat teknis.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2017. Capaian Kinerja (*Performance Result*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan wewenang desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD 2016 – 2021;
2. RENSTRA Dinas Perhubungan provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2017;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

2.1 RPJMD 2016 -2021

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Perteumbuhan Ekonomi, Pgentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam Misi kedua, yaitu :

Pengelolaan Infrastruktur

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya konektivitas antar daerah	2.1	Pemerataan infrastruktur wilayah	2.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi
		2.2	Meningkatkan ketercakupan energi			2.2	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

						2.3	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak
						2.4	Peningkatan ketercukupan energi

2.2 RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dibuat guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Visi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Kalimantan Tengah Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

2. Misi
 Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman.
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna terciptanya keselamatan transportasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tabel II.2 Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Peningkatan Kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
2	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan transportasi

2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan Kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA
			Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P.Bun
			Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah
2	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan
			Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	%	2
2	Meningkatnya Jumlah Penumpang dan Bongkar Muat Barang	Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	%	0,4
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	%	10
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Keselamatan	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	%	1
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	%	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.000.000.000,00	
2	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.815.000.000,00	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	700.000.000,00	
4	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	50.000.000,00	
5	Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur	60.000.000,00	
6	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	955.000.000,00	
Jumlah		6.580.000.000,00	

Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	%	2
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	%	5
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	%	10
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	%	1
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	%	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.000.000.000,00	
2	Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.351.790.600,00	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.100.000.000,00	
4	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	50.000.000,00	
5	Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur	60.000.000,00	
6	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	1.305.000.000,00	
Jumlah		7.866.790.600,00	

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

Berikut merupakan program/ kegiatan prioritas yang mendukung indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

Tabel II.6 Program/ Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	%	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
					Transportasi Embarkasi Haji Antara Bandara Tjilik Riwut dengan Rute Palangkaraya - Banjarmasin	4,111,790.6
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	5	%	Peningkatan Pelayana Angkutan	
					Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan	45,000.0
					Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	
					Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka	200,000.0
					Rehabilitasi Terminal Tipe B Sanggu Buntok	200,000.0
					Pembangunan Prasaranan dan fasilitas perhubungan	
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	%	Studi Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,000,000.0
					Peningkatan Pelayaan Angkutan	
Monitoring Pembinaan dan Pengawasan	75,000.0					

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

					Bidang Pelayaran	
					Pembangunan saraa dan prasarana Perhubungan	
					Pembangunan Dermaga Mangkatip	400,000.0
					Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah	300,000.0
					Monitoring Sarana Prasarana Transportasi SDP Wilayah Kalimantan Tengah	75,000.0
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	%	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Kumai - Kubu	255,000.0
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sampit - Samuda - Ujung Pandaran	350,000.0
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang	350,000.0
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas	350,000.0

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

					Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Dalam Kota Palangkaraya	
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	%	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
					Penertiban dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan	45,000.0
					Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	
					Pemeliharaan/ Perbaikan Instalasi Lalu Lintas (Traffic Light, Warning Light, LPJU Tenaga Surya)	50,000.0
					Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur	
					Penyusunan Draft Peraturan Daerah Tentang Andalalin	60,000.0

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misi serta sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Pengukuran dan analisa capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 menggunakan metode yang telah diatur dalam Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Brieokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Beserta Evaluasi Tujuan Dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	1,9	95
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	5	14,41	288,24
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	9,99	99,86
2	Meningkatnya	Prosentase Fasilitas	1	1,39	139

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

	Keselamatan Transportasi	Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan			
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	0	0

Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	-	1,9
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	5	-	14,41
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	-	9,99
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	-	1,39
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	-	0

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	10	1,9	19 %
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	13	14,41	110,84 %
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	50	9,99	19 %
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	5	1,39	27 %
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	0	0 %

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA

Pada tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Transportasi Embarkasi Haji Antara. Mencapai realisasi sebesar 1,9 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 % atau 72 % dari target tahun lalu yaitu 70 %.

a. Metode Pengolahan Data

Penentuan jumlah reponden dipilih secara acak dari calon jamaah haji, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks responden terpilih ditetapkan dengan rumus Slovin dengan batas kesalahan 10% dan tingkat akurasi 90 %.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

N = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Dari Rumus diatas maka didapat jumlah responden sebanyak 100 Orang dengan perhitungan.

Jumlah Jemaah Haji Tahun 2018 adalah 1.642 Orang (Jumlah Populasi = N)

$$\begin{aligned} n &= \frac{1.642}{1 + 1.642 \times 10 \% ^2} \\ &= \frac{1.642}{16,43} \\ &= 99,93 = 100 \end{aligned}$$

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata – rata tertimbang” masing – masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 8 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Presepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 –100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- a) Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 8 (delapan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel III.5 Pengolahan Indeks Kepuasan Calon Jamaah Haji Per Responden dan Per Unsur Pelayanan

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1								
2								
3								
Dst.								
Jml nilai per unsur								
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yg terisi								
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,125								*)
								**)

Keterangan :

- U1 s.d U8
- NRR : Nilai rata-rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) : IKM Unit Pelayanan X 25

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan calon jamaah haji, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata – rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata – rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,125.

**Tabel III.6 Nilai Rata - Rata Unsur dari Masing - Masing
Unit Pelayanan**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kedisiplinan petugas yang melayani	2,77
2	Tanggung jawab petugas	2,93
3	Ketepatan waktu penjemputan	2,88
4	Kepastian jadwal keberangkat	2,89
5	Kesopanan dan keramahan petugas	2,90
6	Kemudahan dalam pelaksanaan embarkasi haji antara	2,82
7	Kenyamanan transportasi	2,89
8	Keamanan pelayanan transportasi	2,93

Dari tabel diatas Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(U1 \times 0,125) + (U2 \times 0,125) + (U3 \times 0,125) + (U4 \times 0,125) + (U5 \times 0,125) + (U6 \times 0,125) + (U7 \times 0,125) + (U8 \times 0,125) = \text{Nilai Indeks}$$

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar
= $2,88 \times 25 = \mathbf{71,90}$
- b. Mutu Pelayanan **B**.
- c. Kinerja Unit Pelayanan **Baik**.

**Tabel III.7 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik

b. Hasil Survey

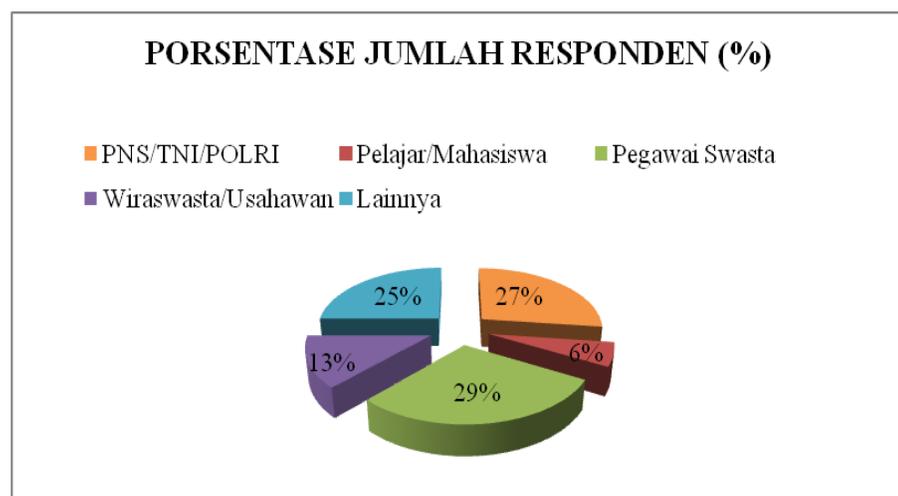
Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Calon Jamaah Haji yang telah dilaksanakan pada 20 – 26 September 2017 didapatkan hasil sebagai berikut :

1) Jumlah Responden Total IKM – Embarkasi Haji Antara

Responden Survey Indeks Kepuasan Calon Jamaah Haji ini adalah sebanyak 100 orang jamaah haji dari jumlah total responden terdiri dari berbagai jenis pekerjaan antara lain : PNS/ TNI/ POLRI 27 orang, Pelajar/Mahasiswa 6 orang, Pegawai Swasta 29 orang, Lainnya 25 orang.

Tabel III.8 : Jumlah responden berdasarkan pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	PNS/TNI/POLRI	27	27%
2	Pelajar/Mahasiswa	6	6%
3	Pegawai Swasta	29	29%
4	Wiraswasta/Usahawan	13	13%
5	Lainnya	25	25%



Gambar 1 Grafik jumlah porsentase responden Embarkasi Haji Antara

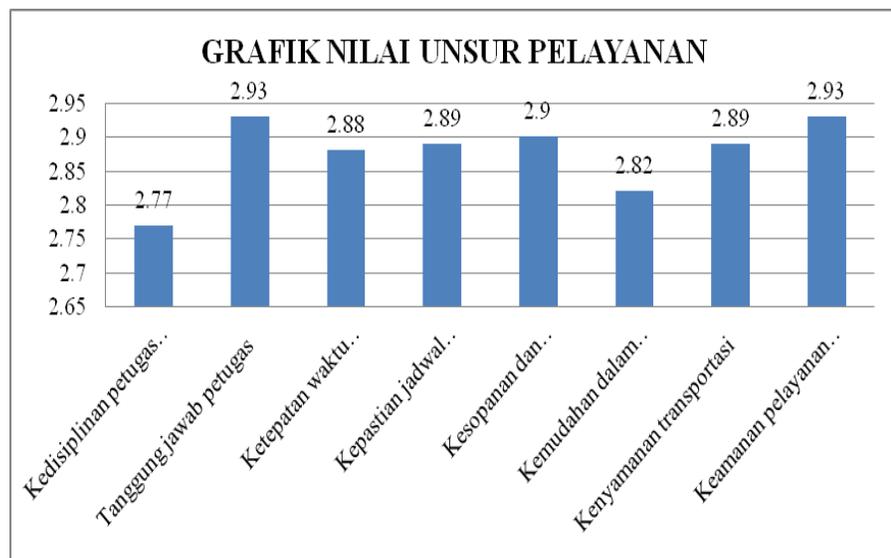
Berdasarkan **Gambar 1** dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh para calon Jamaah Haji dengan latar belakang pekerjaan tertinggi yaitu pegawai swasta, hal ini juga diperkuat dari data Rekapitulasi Profil Pekerjaan Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Hasil survey IKM bidang jasa layanan umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per unsur pelayanan

Dari keseluruhan kuis ioner IKM yang terkumpul dihasilkan nilai IKM total bidang jasa layanan umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel III.9 : Hasil IKM Total Jasa Layanan Umum

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	
1	Kedisiplinan petugas yang melayani	2,77	B
2	Tanggung jawab petugas	2,93	B
3	Ketepatan waktu penjemputan	2,88	B
4	Kepastian jadwal keberangkat	2,89	B
5	Kesopanan dan keramahan petugas	2,90	B
6	Kemudahan dalam pelaksanaan embarkasi haji antara	2,82	B
7	Kenyamanan transportasi	2,89	B
8	Keamanan pelayanan transportasi	2,93	B
Nilai Indeks Kepuasan adalah 2,88			
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks × Nilai Dasar = 2,88 × 25 = 71,90			
Mutu Pelayanan B			
Kinerja Unit Pelayanan BAIK			



Gambar 2 : Grafik Nilai Unsur Pelayanan

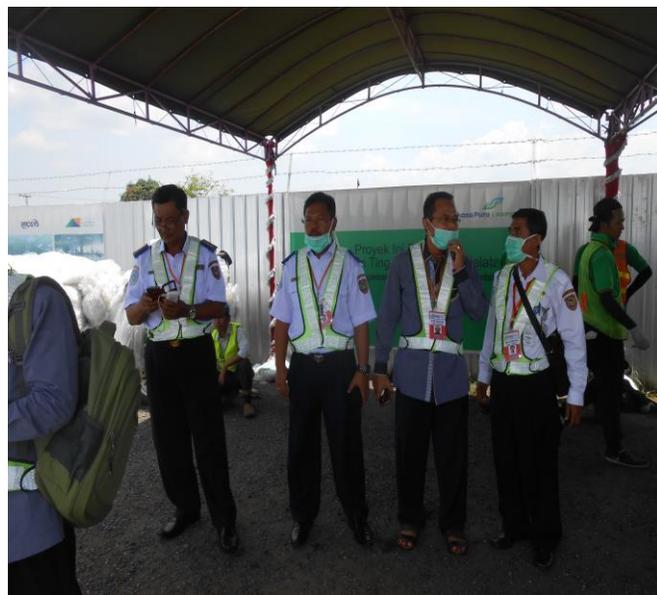
Dari hasil **Tabel** dan **Gambar** diatas diketahui bahwa nilai unsur pelayanan Transportasi Embarkasi Haji Antara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dinilai baik dilihat dari hasil perhitungan survey IKM yang telah dilakukan dan mendapat hasil kinerja unit **BAIK** dengan mutu pelayanan **B** dalam angka 71,90.

Target yang ingin dicapai dari Indeks Kepuasan masyarakat ini adalah 72% atau meningkat 2% dari perolehan tahun lalu sebesar 70%. Belum tercapainya target ini dikarenakan terdapat salah satu unsur penilaian yang dianggap kurang oleh pengguna jasa yakni unsur kedisiplinan petugas yang melayani dengan nilai 2,77%. Selanjutnya dari hasil tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkatkan kinerja pegawai yang bertugas untuk lebih disiplin, tepat waktu, ramah, dan sopan dalam melayani jamaah haji pada tahun 2018 sehingga target yang ditentukan akan tercapai.

DOKUMENTASI EMBARKASI HAJI ANTARA (EHA) TAHUN 2017



DOKUMENTASI EMBARKASI HAJI ANTARA (EHA) TAHUN 2017



2. Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun

Semakin bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 9,5 % (Triwulan I 2017) tidak dipungkiri bahwa mobilitas penduduk Kalimantan Tengah juga meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 terminal Tipe B yang menjadi kewenangannya yaitu Terminal Tipe B Sanggu yang berada di Buntok dan Terminal Tipe B Natai Suka di Pangkalan Bun. Ini

Terdapat beberapa penyedia jasa transportasi yang melayani 2 terminal tersebut antara lain :

a. Terminal Natai Suka (Pangkalan Bun)

Penyedia yang melayani :

- 1) Damri
- 2) PO. Logos
- 3) PO. Yessoe
- 4) PO. Agung Mulia

b. Terminal Sanggu (Buntok)

Penyedia yang melayani :

- 1) Tiga Putra
- 2) Remaja
- 3) Damri
- 4) L300 (Kepemilikan Pribadi)

Dari keseluruhan penyedia jasa transportasi yang melayani Terminal Tipe B Tahun 2017 didapat jumlah penumpang sebesar 101.034 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.10 Jumlah Penumpang

No	Terminal	Jumlah Penumpang (Orang)			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Natai Suka	5.751	26.783	20.089	17.156
2	Sunggu	7.025	8.575	9.495	6.160
	Jumlah	12.776	35.358	29.584	23.316

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Realisasi dari prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun adalah sebesar 14,41% dari 5% yang ditargetkan atau capainnya berjumlah 288,24%, Nilai ini diperoleh dari :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n - 1)}{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

Keterangan :

$f(y)$: Prosentase peningkatan jumlah Penumpang

$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n - 1)$: Selisih jumlah penumpang pada Tahun 2016 - 2017

$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n - 1)$: Jumlah penumpang tahun 2016

$$f(y) = \frac{101,034 - 88.307}{88.307} \times 100\% = 14,41\%$$

Peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Terbukanya akses dari dan menuju Pontianak Kalimantan Barat;
- 2) Diperbaikinya infrastruktur terminal;
- 3) Tersedianya sarana transportasi yang semakin baik;
- 4) Semakin berkurangnya angkutan travel baik yang resmi maupun yang tidak resmi sehingga para penumpang berpindah menggunakan moda AKDP (Bus Besar).

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung meningkatnya jumlah penumpang :

- 1) Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan
- 2) Rehabilitasi terminal Tipe B Natai Suka Pangkalan Bun
- 3) Rehabilitasi Terminal Tipe B Sanggu Buntok

DOKUMENTASI TERMINAL PENUMPANG TIPE B

1. Terminal Natai Suka Pangkalan Bun



2. Terminal Sanggu Buntok



3. Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah

Jumlah penumpang dan barang ASDP pada tahun 2017 adalah sebesar 212.620 orang dan 43.820 ton. Jumlah ini memperoleh realisasi sebesar 9,99% dari 10% yang ditargetkan. Dengan rumusan sebagai berikut :

$$f(y) = \frac{\left(\frac{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } (n-1)} \times 100\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } (n-1)} \times 100\% \right)}{2}$$

Keterangan :

$f(y)$: Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah

\sum Jumlah Penumpang Tahun $n-(n-1)$: Selisih jumlah penumpang ASDP Pada tahun 2016 – 2017

\sum Jumlah Penumpang Tahun $(n-1)$: Jumlah penumpang tahun 2016

\sum Jumlah Penumpang Tahun $n-(n-1)$: Selisih jumlah barang ASDP pada tahun 2016 – 2017

\sum Jumlah Penumpang Tahun $(n-1)$: Jumlah barang tahun 2016

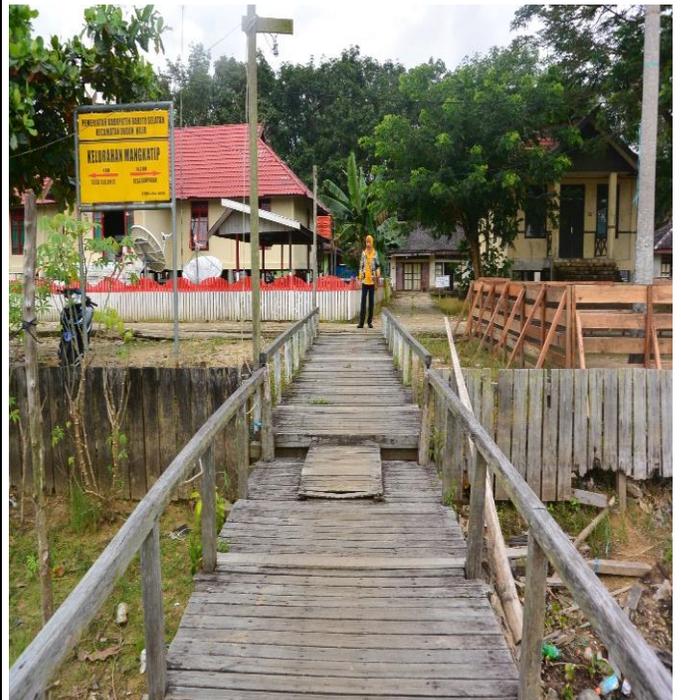
$$f(y) = \frac{\left(\frac{212.620 - 197.033}{197.033} \times 100\% \right) + \left(\frac{43.820 - 38.281}{38.281} \times 100\% \right)}{2} = 9,99\%$$

Realisasi ini dinilai cukup baik pada tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah diperoleh dengan baik.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

- 1) Studi Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Monitoring Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pelayaran
- 3) Pembangunan Dermaga Mangkatip
- 4) Rehabilitasi Sungai di Kalimantan Tengah
- 5) Monitoring Sarana Prasarana Transportasi SDP Wilayah Kalimantan Tengah

**DOKUMENTASI
KUNJUNGAN LAPANGAN KE DERMAGA MANGKATIP KAB. BARITO SELATAN**



DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DERMAGA MANGKATIP



4. Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase fasilitas jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya menambah jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibutuhkan, namun tidak dipungkiri jumlah fasilitas keselamatan jalan yang ada saat ini dinilai masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan dan panjang jalan provinsi yang telah dibangun.

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa fasilitas keselamatan jalan antara lain :

- 1) Rambu Jalan : 137 unit
- 2) Guadrail : 100 meter
- 3) Delineator : 260 unit
- 4) Marka Jalan : 15.462,5 meter

Dalam perhitungan prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan dilakukan dengan memprosentasekan terlebih dahulu tingkat prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang perjenisnya, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Dengan rumusan sebagai berikut :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Faskes Jalan Tahun } n}{\sum \text{Kebutuhan Faskes}} \times 100 \%$$

Keterangan :

$f(y)$: Prosentase Faskes terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

$\sum \text{Faskes Jalan Tahun } n$: Jumlah Faskes Terpasang Tahun 2017 (Perjenis Faskes)

$\sum \text{Faskes Jalan Tahun}$: Jumlah Kebutuhan Faskes (Perjenis Faskes)

Tabel III.11 Prosentase Fasilitas Keselamatan Terpasang

No.	Uraian	Satuan	Kebutuhan	Terpasang	
				2017	% Pemenuhan 2017
1	2	3	4	5	6
1	Rambu Jalan	Unit	4,249	137	3.22
2	Guadrail	Meter	12,828	100	0.78
3	Delineator	Unit	18,494	260	1.41
4	Paku Jalan	Meter	118,436	0	0.00
5	Marka Jalan	Meter	1,015,593	15462.5	1.52
				Jumlah	6.93
				Rata-rata %	1.39

DOKUMENTASI PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN



5. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlahkecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan. Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum merupakan salahsatu tupoksi bidang angkutan jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

- 1) Penertiban dan pengawasan angkutan jalan;
- 2) Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic light, warning light, LPJU tenaga surya);
- 3) Penyusunan draft peraturan daerah tentang andalalin.

Kegiatan tersebut diatas dinilai belum efektif untuk memenuhi indikator ini karena penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum seharusnya lebih memberikan pembinaan kepada pengemudi untuk mewujudkan kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna angkutan umum. Sehingga diharapkan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berkurang dari tahun ke tahun, namun data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan tahun 2017 yang melibatkan angkutan umum adalah 2 kendaraan sehingga target yang diharapkan sebanyak 100% tidak tercapai.

Penilaian prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) diperoleh dengan rumusan :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1) - n}{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

f(y) : Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan

\sum Jumlah laka Angkutan Umum tahun (n-1)-n : Selisih Jumlah Kecelakaan
Tahun 2017 - 2016

\sum Jumlah laka Angkutan Umum tahun (n-1) : Jumlah Kecelakaan Tahun
2016

a. Faktor Penyebab Kecelakaan

1) Kronologi Kecelakaan Bus Damri Dengan Truck Hino Box

Tempat Kejadian Perkara	Jalan Trans Kalimantan Jembatan Layang Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng
Kendaraan Terlibat Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Unit Mobil HINO Truck Box Warna Hijau Putih No. Pol.: DA 8476 BL • 1 (satu) Unit Mobil Bus Damri warna Putih No. Pol.: KH 7002 AM
Identitas Pengendara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengemudi mobil Bus Damri warna putih No. Pol.: KH 7002 AM An. ROMLI, BASARANG, 07-09-1975, Laki-laki, Islam, Swasta, Alamat Jl. Tjilik Riwut Km. 10 No. 20 Kel. Bukit Tunggal, kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya – Kalteng. 2. Pengemudi Hino Truck Box warna hijau putih DA 4876 BL An. IBNU ADY WICAKSONO, BANJAR, 09-05-1990, Islam, Swasta Jl. Tanah Abang RT. 03 RW. 01, Kel. Tanah Abang, Kec. Matraman Kab. Banjar-Kalsel.
Saksi – saksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. IMAM SOLIHIN, Umur 35 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Jl. BaliGg. Binaan Antasan Besar, Kec. Banjar Tengah, Kota Banjar-Kalsel. 2. Agus Sukarti, Umur 35 Tahun, Islam, Swasta, Desa Talio Muara, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulau Pisau-Kalteng.
Korban/Kerugian Materil	<p>Meninggal Dunia : 1 Orang Luka Berat : 7 Orang Luka Ringan : 13 Orang Kerugian Materi : Rp. 60.000.000,-</p>
Kronologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Bus damri yang bermuatan 24 orang penumpang dari arah Pulang Pisau menuju Palangka Raya pada saat di TKP Mobil Bus berada di jalur

	<p>sebelah kiri arah Palangka Raya.</p> <p>2. Dari arah berlawanan mobil Truck Hino Box yang tiba-tiba melebar ke kanan, karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan dengan mobil Bus Damri, akibat</p> <p>3. Dari kejadian tersebut pengemudi Bus dan penumpang mengalami luka-luka, sedangkan pengemudi Truck Box Meninggal Dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit.</p>
Keadaan Cuaca	Siang hari, cerah, jalan lurus beraspal dan arus lalin ramai
Penyebab kecelakaan berdasarkan ket saksi	Pengemudi Mobil Hino Truck Box warna hijau putih No. Pol.: DA 8476 BL. Mengantuk
Tindakan Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan 2. Mendatangi TKP 3. Mengevakuasi Korban 4. Melakukan Oleh TKP 5. Mengamankan Bahan Bukti 6. Melakukan Penyelidikan

Foto Kronologi



2) Kronologi Kecelakaan Tunggal Bus Yessoe

Tempat Kejadian Perkara	Jalan Jenderal Soedirman Kilometer 102 Trans Kalimantan Sampit – Pangkalan Bun tepatnya di Desa Rungauraya Kecamatan danau Seluluk Kabupaten Seruyan, Kalteng
Kendaraan Terlibat Kecelakaan	Bus Yessoe Warna Hitam No Polisi KH 7119 GL.
Identitas Pengendara	Muhammad Frenski Borneo, 32
Korban/Kerugian Materil	6 orang luka ringan di bawa ke RS dr Murjani Sampit
Kronologis	Pukul 13.29 Bus keluar jalur dan terbalik tepat di Jl. Turunan dan Tikungan Patah di karenakan Supir Mengantuk.
Keadaan Cuaca	Cerah
Penyebab Kecelakaan Berdasarkan	Human Error (Supir Mengantuk)

Foto Kronologis



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.12 : Realisasi Keuangan

No	Jenis Belanja	Pagu Dana	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	8.986.857.354,00	6.285.676.961,00	69,94
2	Belanja Langsung	13.816.030.600,00	12.378.130.148,00	89,59
Jumlah		22.802.887.954,00	18.663.807.109,00	79,76

TABEL III. 13 : PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	1,9	95	4.111.790,60	4.008.219,12	97,48
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	5	14,41	288,24	445.000,00	418.788,40	94,11
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	9,99	99,86	1.850.000,00	1.807.548,95	97,71
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	1,39	139	1.305.000,00	1.233.911,40	94,55
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	0	0	155.000,00	153.092,88	98,77

Tabel III.14 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	95	97,48	- 2,48
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	288,24	94,11	194,13
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	99,86	97,71	2.15
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	139	94,55	44,45
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	0	98,77	-98,77

**Tabel III.15 : Anggaran Yang Terealisasi pada Tahun 2017
 Berdasarkan Program Kegiatan**

No	Program	Pagu Dana	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.064.240.000	2.682.194.129	87,53
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.000.000	420.678.000	97,83
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	170.000.000	149.200.000	87,76
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275.000.000	267.289.573	97,19
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	110.000.000	109.998.950	99,99
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.000.000.000	983.675.800	98,36
7	Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.951.790.600	4.582.803.293	92,55
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.800.000.000	1.694.866.400	94,16
9	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	50.000.000	49.600.000	99,20
10	Pengadaan Fasilitas Operasional Kendaraan Bermotor	500.000.000	499.450.000	99,89
11	Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur	60.000.000	59.332.400	98,89
12	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	1.305.000.000	1.231.911.400	94,39
13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	100.000.000	44.460.800	44,46
Jumlah		13.816.030.600	12.775.460.745	91,7

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama pada tiap-tiap sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel IV.1 : Capaian Kinerja Dari Pengukuran IKU
 Atau Capaian Kinerja RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	1,9	95
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	5	14,41	288,24
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	9,99	99,86
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	1,39	139
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	0	0

4.2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang masih menjadi perhatian pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait indikator capaian utama meliputi :

1. Penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

Dari data yang diperoleh pada tahun 2017 terdapat 2 kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dengan angka kecelakaan yang sama pada tahun 2016 maka kinerja pada tahun 2017 terlihat tidak memiliki kenaikan sama sekali yakni sebesar 0%. Kecelakaan ini terjadi pada triwulan IV yang salah satunya diakibatkan karena kesalahan pengemudi yang mengantuk pada saat mengendara. Capaian Kinerja yang didapat oleh tahun 2017 sebesar 0% dikarenakan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum sangat kecil sehingga apabila terjadi kecelakaan hal ini mengakibatkan kinerja berkurang sangat drastis dan berdampak seakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tidak melaksanakan kinerja dengan baik.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih memonitor angkutan umum termasuk dengan pengemudi sehingga kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia akan berkurang 100%.
2. Akan melaksanakan penertiban angkutan jalan sehingga dapat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, baik ijin angkutan, kelayakan kendaraan, dan kelengkapan surat-surat mengemudi angkutan umum.
3. Melengkapi seluruh fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi sebagai faktor keselamatan penunjang keselamatan dijalan.

Palangka Raya, Februari 2018
Kepala Dinas

Ati Mulyati, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 199203 2 00